



EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK

Nina Anggei Febrianti, Artika Sari Devi, Auliyah Sofwatul Arifah, Nadia Dwi Maulidina, Melati Regina Putri, Bunga Mahligai Arum, Ria Angin

Universitas Muhammadiyah Jember, FISIP, Ilmu Pemerintahan

Email: ninaanggei19@gmail.com, deviartika016@gmail.com,
auliya.sofwatul@gmail.com, maulidinanadia45@gmail.com,
comellcantik701@gmail.com, arumbungamahligai@gmail.com
ria.angin@unmuhjember.ac.id

Abstract

This article discusses public policy evaluation. Policy evaluation is a systematic assessment activity that aims to assess the performance, effectiveness, efficiency and impact of a public policy that has been implemented. The aim is to provide input for future policy improvements. In general, this article explains the meaning of policy evaluation, its functions, assessment criteria, evaluation approaches, and methods used in conducting evaluations. The method for preparing this article is literature study (Literature Review), namely by searching or finding data from various sources that are relevant to the general concept of policy evaluation, then complemented by one group's thoughts on the topic presented. This article also explains the purpose of evaluation, namely to determine the level of policy achievement, efficiency, output, impact and deviations. It is hoped that the evaluation results can provide input for the formulation of better policies in the future. Overall, this article comprehensively discusses the basic concepts and methods applied in evaluating public policies.

Keywords: *evaluation, policy, public*

PENDAHULUAN

Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Kegiatan evaluasi dapat menentukan baik tidaknya suatu kebijakan. Aktivitas evaluasi seringkali disamaartikan dengan kegiatan pemantauan. Kegiatan pemantauan berbeda dengan aktivitas evaluasi kebijakan. Pemantauan utamanya menekankan pada pembentukan premis-premis faktual mengenai kebijakan publik, sedangkan evaluasi memfokuskan diri pada penciptaan premis-premis nilai yang diperlukan untuk menghasilkan informasi mengenai kinerja kebijakan (Dunn, 2003). Melalui evaluasi kebijakan, pemerintah, lembaga, atau organisasi dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang

bagaimana kebijakan tersebut telah berfungsi dalam praktik, sejauh mana mencapai tujuan yang diinginkan, serta efek samping dari suatu kebijakan.

Evaluasi kebijakan juga dapat dikatakan sebagai alat penting untuk memastikan bahwa kebijakan publik efektif, efisien, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Anugrah Dwi (2023) menyatakan bahwa evaluasi kebijakan dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang seberapa baik atau buruk suatu kebijakan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Proses evaluasi memungkinkan untuk mengukur sejauh mana sebuah kebijakan telah mencapai tujuan dan bagaimana dampaknya secara langsung pada masyarakat. Oleh karena itu, dengan melakukan evaluasi pembuat kebijakan dapat terus meningkatkan kinerjanya dan memberikan layanan terbaik bagi masyarakat.

Tujuan evaluasi kebijakan ini berperan untuk memberikan masukan atau arahan untuk program selanjutnya atau masukan ke kebijakan yang sudah ada. Hasil evaluasi kebijakan juga dapat digunakan untuk mencegah program yang merugikan masyarakat dan menentukan keberlanjutan program di masa mendatang. Evaluasi melibatkan penilaian program atau kebijakan untuk mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dan menemukan elemen apa saja yang menyebabkan kegagalan atau keberhasilan program tersebut (Fauziah Akbar, 2023). Para pemimpin saling berinteraksi dan melakukan interelasi didalam setiap tahap pembuatan kebijakan publik (R. Angin, A. S Manggala, 2022). Para pengambil keputusan harus bertindak dengan serius jika hasil evaluasi program menunjukkan bahwa program memerlukan perubahan.

METODE PENELITIAN

Metode penyusunan artikel ini adalah studi kepustakaan (*Literatur Review*), yaitu dengan mencari atau menemukan data dari berbagai sumber yang relevan dengan konsep umum evaluasi kebijakan, kemudian dilengkapi dengan pemikiran satu kelompok tentang topik yang disajikan. Menurut Mahamun (2021), studi kepustakaan merupakan penelitian yang memanfaatkan berbagai literatur yang relevan untuk memperoleh data penelitian dalam bentuk deskripsi.

Sumber data dalam penelitian ini adalah buku dan artikel ilmiah. Penelitian studi kepustakaan mempunyai beberapa ciri, yaitu (1) Berhubungan langsung dengan data pustaka, tidak langsung dari lapangan; (2) Data perpustakaan merupakan sumber

sekunder, bukan tangan pertama; dan (3) Data perpustakaan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu (Azizah, 2022).

Agar kaidah ilmiah dalam penelitian ini tetap terpenuhi, maka peneliti perlu mengacu pada prinsip tujuan penelitian yang bersifat pembuktian, artinya data yang peneliti telaah dari buku dan artikel ilmiah merupakan bukti keragu-raguan terhadap kebenaran yang ada proses pencarian dan penyertaan (Hikmawati, 2020). Penyajian data merupakan serangkaian organisasi informasi yang memungkinkan diambilnya kesimpulan penelitian. Pada langkah ini, peneliti berusaha mengumpulkan data-data yang relevan sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan mempunyai makna tertentu. Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna dan memberikan kemungkinan penarikan kesimpulan serta pemberian tindakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Evaluasi Dalam Menganalisis Kebijakan

Evaluasi kebijakan publik merupakan proses sistematis yang bertujuan untuk mengevaluasi keberhasilan, efektivitas, efisiensi, dan dampak kebijakan yang telah diimplementasikan. Tujuannya adalah memberikan masukan atau arahan untuk program selanjutnya atau masukan bagi kebijakan yang sudah ada. Evaluasi kebijakan merupakan bagian penting dalam analisis kebijakan publik. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai sejauh mana suatu kebijakan telah mencapai tujuannya, apakah kebijakan tersebut efektif dan efisien, dan apakah kebijakan tersebut memiliki dampak yang positif atau negatif.

Sifat Evaluasi, yaitu (1) Fokus Nilai: Evaluasi berbeda dengan pemantauan, dipusatkan pada penilaian menyangkut keperluan atau nilai dari sesuatu kebijakan dan program. Evaluasi terutama merupakan usaha untuk menentukan manfaat atau kegunaan sosial kebijakan atau program, dan bukan sekedar usaha untuk mengumpulkan informasi mengenai hasil aksi kebijakan yang terantisipasi dan tidak terantisipasi; (2) Interdependensi Fakta Nilai: Evaluasi mempertimbangkan bahwa kebijakan atau program tidak hanya berdampak pada individu atau kelompok tertentu, tetapi juga pada masyarakat secara keseluruhan. Tuntutan evaluasi bergantung pada "fakta" dan "nilai". Pernyataan ini harus didukung oleh bukti bahwa hasil kebijakan sebenarnya adalah hasil dari tindakan yang diambil untuk memecahkan masalah tertentu (Stocks, 2016). Oleh

karena itu, pemantauan diperlukan untuk evaluasi; (3) Orientasi Masa Kini dan Masa Lampau: Evaluasi bersifat retrospektif, dilakukan setelah aksi kebijakan dilaksanakan. Berbeda dengan tuntutan advokatif, tuntutan evaluatif berfokus pada hasil masa lalu daripada hasil masa depan. Rekomendasi yang mencakup premis-premis nilai bersifat prospektif dan dibuat sebelum aksi-aksi dilakukan (*ex post*), sedangkan evaluasi bersifat retrospektif dan dilakukan setelah aksi-aksi dilakukan (*ex ante*). (Ii et al., 2008); (4) Dualitas Nilai: Nilai yang mendasari evaluasi memiliki kualitas ganda, karena dapat dilihat sebagai tujuan dan cara untuk memperbaiki system. Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi memiliki kualitas ganda karena dianggap sebagai tujuan dan cara. Seringkali, nilai-nilai disusun dalam hirarki yang menggambarkan kepentingan relatif dan ketergantungan antar tujuan dan sasaran.

B. Fungsi Evaluasi

Evaluasi merupakan kegiatan untuk melihat atau menilai keberhasilan atau kegagalan sebuah organisasi/unit kerja dalam melakukan tugas dan fungsi yang dibebankan kepadanya. Dalam evaluasi kinerja kebijakan selalu dikaitkan dengan sumber daya yang ada dibawah kewenangannya seperti sumber daya manusia, Dana prasarana, metode kerja dan hal hal lain yang berkaitan. Fungsi pokok dari evaluasi bukanlah mencari kesalahan dalam implementasinya, melainkan untuk melihat seberapa besar kesenjangan antara pencapaian dan harapan dari suatu kebijakan publik melihat apa yang terjadi pada masalah atau masalah masyarakat (Ali Wafa, Ria Angin, 2024). Jadi, evaluasi berfungsi untuk mencari kekurangan dan menutup atau memperbaiki kekurangan yang terjadi.

C. Kriteria Untuk Evaluasi Kebijakan

Menurut William N. Dunn (2003) Untuk menghasilkan informasi tentang kinerja kebijakan, analis menggunakan berbagai jenis kriteria untuk mengevaluasi hasil kebijakan. Kriteria evaluasi diterapkan secara *restrospektif (ex post)* (Ii & Pustaka, 2004). Berikut ada 6 teori dari William N. Dunn mengenai indikator evaluasi kebijakan: (1) Efektivitas: apakah hasil yang diinginkan telah dicapai? (2) Efisiensi: seberapa banyak Upaya yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan? (3) Kecukupan: seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah? (4) Perataan: apakah baiaya dan keuntungan didistribusikan secara merata kepada berbagai kelompok? (5) Responsivitas: apakah hasil kebijakan memenuhi kebutuhan, preferensi, atau nilai

kelompok tertentu? (6) Ketepatan: apakah tujuan atau hasil yang diinginkan benar-benar bermanfaat atau berharga?

D. Pendekatan Terhadap Evaluasi

Berikut ada 3 pendekatan terhadap evaluasi: (1) Evaluasi Semu, dengan menggunakan teknik deskriptif, evaluasi semu menghasilkan informasi yang dapat diandalkan tentang hasil kebijakan. Metode ini tidak bertanya tentang manfaat atau nilai dari hasil tersebut bagi individu, kelompok, atau masyarakat secara keseluruhan. Asumsi utama dari evaluasi semu adalah bahwa ukuran tentang manfaat atau nilai merupakan sesuatu yang dapat terbukti sendiri (*self evident*) atau tidak kontroversial (Fowler, F.J. 2009). Namun setiap hasil kebijakan yang ada (misalnya, jumlah lulusan pelatihan yang dipekerjakan, unit-unit pelayanan medis yang diberikan, keuntungan pendapatan bersih yang dihasilkan) diterima begitu saja sebagai tujuan yang tepat (Jordan, 2013); (2) Evaluasi Formal, evaluasi formal adalah proses penilaian yang sistematis, terstruktur, dan terencana untuk menilai efektivitas suatu program, kebijakan, atau intervensi berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi ini dilakukan dengan menggunakan metodologi ilmiah yang ketat dan menghasilkan data yang valid dan reliabel. (Vionalita, 2020); (3) Evaluasi Keputusan Teoritis, merupakan penjelasan yang dapat dipahami dan valid mengenai hasil kebijakan yang secara eksplisit diinginkan oleh berbagai kelompok kepentingan yang digunakan untuk memberikan informasi (Nasbi, 2017). Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami tujuan dan nilai yang mendasari keputusan kebijakan dan untuk menilai sejauh mana kebijakan mencapai tujuan dan nilai tersebut.

Evaluasi keputusan teoretis berbeda dengan dua pendekatan evaluasi lainnya, yaitu evaluasi semu dan evaluasi formal, dalam hal berikut: Fokus: Evaluasi berfokus pada manfaat perilaku pemangku kepentingan, sedangkan evaluasi formal berfokus pada efektivitas dan efisiensi program, Metode: Evaluasi pengambilan keputusan secara teoritis menggunakan metode deskriptif, sedangkan evaluasi semu menggunakan metode simulasi, dan evaluasi formal menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. (Maylanie, 2022), Tujuan: Evaluasi keputusan teoritis bertujuan untuk memberikan informasi yang dapat diandalkan dan valid mengenai hasil kebijakan yang secara eksplisit diinginkan oleh berbagai pemangku kepentingan, sedangkan evaluasi semu

bertujuan untuk memprediksi perilaku pemangku kepentingan. Evaluasi formal bertujuan untuk menilai efektivitas dan efisiensi program.

Langkah-Langkah mengevaluasi keputusan teoritis umumnya evaluasi keputusan teoritis dilakukan melalui langkah-langkah berikut.

1. Mengidentifikasi tujuan dan nilai: Langkah pertama adalah mengidentifikasi tujuan dan nilai yang menjadi dasar rencana tersebut. keputusan politik. Hal ini dapat dilakukan dengan meninjau dokumen kebijakan, mewawancarai pembuat kebijakan, dan menganalisis pernyataan publik mereka.
2. Menganalisis proses pengambilan keputusan: Langkah kedua adalah menganalisis proses pengambilan keputusan yang mengarah pada kebijakan. Hal ini termasuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan serta peran dan tanggung jawab berbagai pemangku kepentingan.
3. Mengevaluasi hasil kebijakan: Langkah ketiga adalah mengevaluasi hasil kebijakan. Hal ini dilakukan dengan membandingkan hasil sebenarnya dengan tujuan dan nilai yang telah ditentukan pada langkah pertama.
4. Kesimpulan dan Rekomendasi: Langkah terakhir adalah merangkum hasil evaluasi dan membuat rekomendasi untuk perbaikan kebijakan di masa depan.

E. Metode-metode Evaluasi

Metode evaluasi kebijakan publik adalah pendekatan yang digunakan untuk mengukur dan menganalisis efektivitas, kinerja dan dampak dari suatu kebijakan publik yang telah diimplementasikan. Menurut Finsterbusch dan Motz dalam Subarsono (2005:128), Metode evaluasi diciptakan untuk memberikan penjelasan dan pemahaman yang komprehensif tentang apakah kebijakan telah mencapai tujuan yang ditetapkan, sejauh mana kebijakan tersebut berhasil, dan bagaimana dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan untuk melakukan evaluasi terhadap program yang telah diimplementasikan, ada beberapa metode evaluasi yang dapat dipilih yakni:

1. *Single program after-only*, jenis evaluasi yang melakukan pengukuran kondisi atau penilaian terhadap program setelah meneliti setiap variabel yang dijadikan kriteria program, sehingga analis tidak mengetahui baik atau buruk respon kelompok sasaran terhadap program. Evaluasi ini hanya berfokus pada kondisi kelompok sasaran setelah kebijakan diimplementasikan, tanpa

membandingkannya dengan keadaan sebelumnya atau dengan kelompok lain yang tidak menerima kebijakan tersebut (Simanjuntak, 2016).

2. *Single program before-after*, merupakan penyempurnaan dari jenis pertama yaitu adanya data tentang sasaran program pada waktu sebelum dan sesudah pelaksanaan program. Dalam metode ini, evaluasi dilakukan dengan membandingkan kondisi kelompok sasaran sebelum dan setelah menerima kebijakan. Namun, tidak digunakan kelompok pembanding (*control group*) yang digunakan untuk perbandingan dengan kelompok sasaran penerima kebijakan.
3. *Comparative after-only*, merupakan penyempurnaan evaluasi kedua tapi tidak untuk yang pertama. Selain itu, analisis hanya fokus pada status tujuan, bukan tujuan. Dalam metode ini, evaluasi hanya melihat perubahan yang terjadi pada kelompok sasaran setelah kebijakan diimplementasikan, tanpa membandingkannya dengan keadaan sebelum kebijakan diimplementasikan.
4. *Comparative before-after* yaitu informasi yang diperoleh berdasarkan dampak program terhadap kelompok sasaran sebelum dan sesudah pelaksanaan program. Dalam metode ini, evaluasi dilakukan dengan membandingkan keadaan kelompok sasaran sebelum dan sesudah kebijakan diimplementasikan, serta membandingkannya dengan keadaan kelompok pembanding yang tidak menerima kebijakan.

Dari pendapat di atas memperlihatkan bahwa evaluasi kebijakan bermaksud untuk mengetahui 4 (empat) aspek, yaitu: (1) proses pembuatan kebijakan, (2) proses implementasi kebijakan, (3) konsekuensi kebijakan, dan (4) efektifitas dampak kebijakan. Keempat aspek pengamatan ini yang mendorong seorang evaluator untuk mengevaluasi isi kebijakan yang mempengaruhi seluruh proses kebijakan (Arnol, 2013).

F. Tujuan Evaluasi

Dalam mengevaluasi kebijakan, ada fokus yang ingin dicapai oleh pengevaluasi. Evaluasi kebijakan memiliki tujuan yang dapat dirinci sebagai berikut (Hajaroh, 2019):

1. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan, melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan.
2. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan, dengan evaluasi juga dapat diketahui berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan.

3. Mengukur tingkat keluaran (*outcome*) suatu kebijakan, salah satu tujuan evaluasi adalah mengukur berapa besar dan kualitas pengeluaran atau output dari suatu kebijakan.
4. Mengukur dampak suatu kebijakan, pada tahap lebih lanjut, evaluasi ditujukan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif maupun negatif.
5. Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan, evaluasi juga bertujuan untuk mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi, dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target.
6. Sebagai bahan melakukan (*input*) untuk kebijakan yang akan datang, tujuan akhir dari evaluasi adalah untuk memberikan masukan bagi proses kebijakan kedepan agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik.

KESIMPULAN

Evaluasi kebijakan publik merupakan proses sistematis yang bertujuan untuk mengevaluasi keberhasilan, efektivitas, efisiensi, dan dampak kebijakan yang telah diimplementasikan. Tujuannya adalah memberikan masukan atau arahan untuk program selanjutnya atau kebijakan yang sudah ada. Terdapat beberapa metode evaluasi kebijakan, seperti *comparative after-only* dan *comparative before-after*, yang digunakan untuk menilai dampak kebijakan terhadap kelompok sasaran sebelum dan sesudah pelaksanaan program. Evaluasi kebijakan memiliki tujuan yang dapat dirinci, seperti menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan, mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan, dan menilai efektivitas dampak kebijakan. Evaluasi kebijakan fokus pada penilaian nilai dan interdependensi fakta nilai, serta bersifat retrospektif dengan orientasi pada hasil masa lalu. Terdapat tiga jenis evaluasi, yaitu evaluasi semu evaluasi formal, dan evaluasi Keputusan teoritis. Dengan melakukan evaluasi kebijakan secara berkala dan sistematis, pemerintah dan organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan yang diimplementasikan efektif, efisien, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Evaluasi kebijakan juga membantu dalam meningkatkan kualitas kebijakan publik dan mencapai tujuan yang diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Angin, R., Manggala, A. S. (2022). *Mengapa Agenda Kebijakan Pemerintah Diabaikan: Studi Konflik PT. Imasco Asiatic dan Petani di Kabupaten Jember. Pustaka Abadi. Jember.*
- Arnol, M. (2013). *Evaluasi Kebijakan Program Jaminan Masyarakat Semesta di Kabupaten Lampung Utara.*
- Azizah, A. & Purwoko, B. (2022) *Studi kepustakaan mengenai landasan teori dan praktik konseling naratif.* <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-bk-unesa/article/view/18935/17288>
- Dunn, William N., (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta, Gajah Mada University.
- Hajarah, M. (2019). POHON TEORI EVALUASI KEBIJAKAN DAN PROGRAM (Metode, Nilai dan Menilai, Penggunaan). *Foundasia*, 9(1), 27-42. <https://doi.org/10.21831/foundasia.v9i1.26149>
- Hikmawati, F. (2020). *Metodologi penelitian*. Depok: Rajawali Pers.
- Ii, B. A. B., Pustaka, A. T., & Publik, K. (2008). *2007:16*. 12-36.
- Ii, B. A. B., & Pustaka, T. (2004). *No Title*. 6–31.
- Jordan. (2013). Teori Evaluasi Kebijakan. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689-1699.
- Mahanum. (2021). *Tinjauan Kepustakaan*. ALACRITY: Journal Of Education, Vol.2, No.1, 1-12.
- Maylanie, J. T. (2022). Tahapan Pengambilan Keputusan (Kajian Teoritis dari James A. F. Stoner). *OPTIMAL: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 2(2), 263–274.
- Nasbi, I. (2017). MANAJEMEN KURIKULUM: Sebuah Kajian Teoritis. *Idaarah: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 1(2), 318-330. <https://doi.org/10.24252/idaarah.v1i2.4274>
- Simanjuntak, K. Z. (2016). Evaluasi Dampak Implementasi Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa Gudang Garam Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai. *International Encyclopedia of Human Geography*, Universitas Medan Area.
- Stocks, N. (2016). 済無 *No Title No Title No Title*. 1-23.
- Wafa, A., Angin, R.(2024). Formulasi Kebijakan Program Banyuwangi Hijau, dalam Mewujudkan Pengelolaan Sampah Berkelanjutan (Studi di Desa Bunder, Kecamatan Kabat). *JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK VOLUME 9(1)*, 1-14. ISSN PRINT: 2502-0900, ISSN ONLINE: 2502-2032
- Vionalita, G. (2020). Evaluasi Kebijakan Kesehatan (KAK 471). *Modul 13, Kak 471*, 0-17.